RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BENGKONG
TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KOTA

BATAM

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim…

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas selesainya penulisan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021–2026.

Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bengkong untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Bengkong dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta penganggarannya.

Semoga Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Bengkong dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Bengkong, 16 November 2021

CAMAT BENGKONG

M. FAIRUS R. BATUBARA, S. STP, M.Si
NIP. 19820620 200112 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Gambar iv
Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN... 42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 44

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 61

BAB VIII PENUTUP 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Proses/Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen 6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur 22
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....22
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 23
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....23
Tabel 2.5 Daftar Aset/Modal Perangkat Daerah.....24
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....25
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 27
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 33
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 43
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 46
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah 48
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis Perangkat Daerah mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Fungsi Renstra adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangka Daerah (Renstra PD) terdapat enam tahapan penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Gambar 1.1

Proses/Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

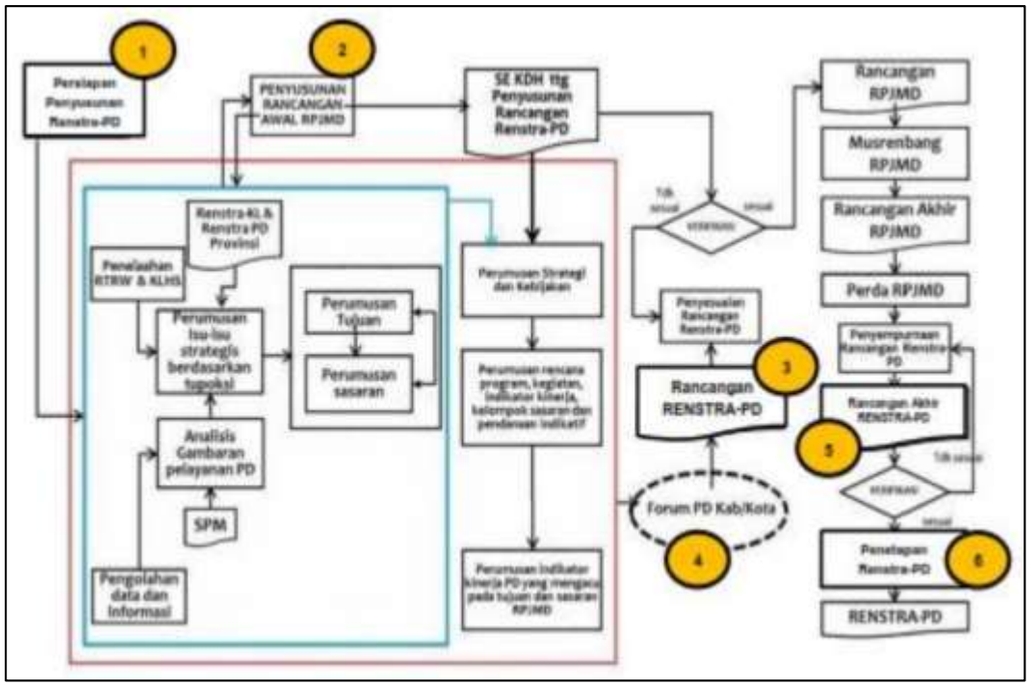

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

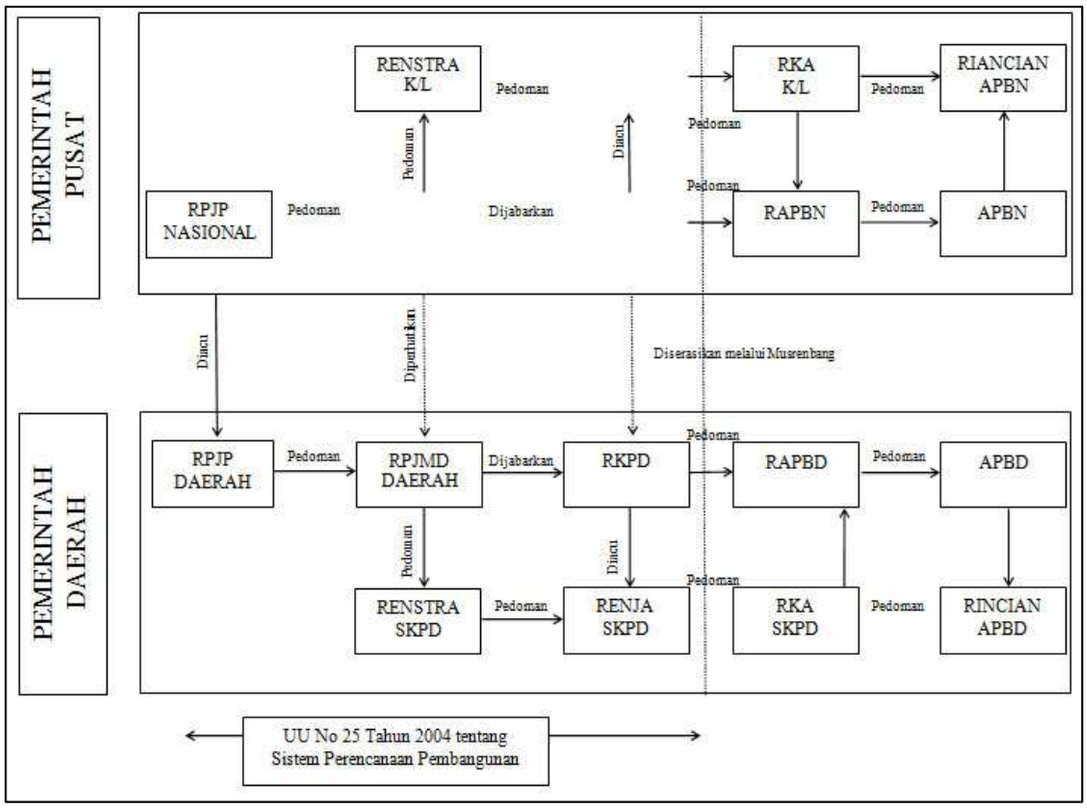

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2041 Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 119);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat;
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

a. Memberikan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;

b. Menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. Memberikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
d. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan oleh Perangkat Daerah agar sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 mempedomani Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Bengkong Kota Batam:

a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
c. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Bengkong terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Bengkong Laut;
b. Kelurahan Bengkong Indah;
c. Kelurahan Sadai; dan
d. Kelurahan Tanjung Buntung.

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan

oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Bengkong terdiri dari:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pelayanan Umum;
f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
h. Kelompok Jabatan fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

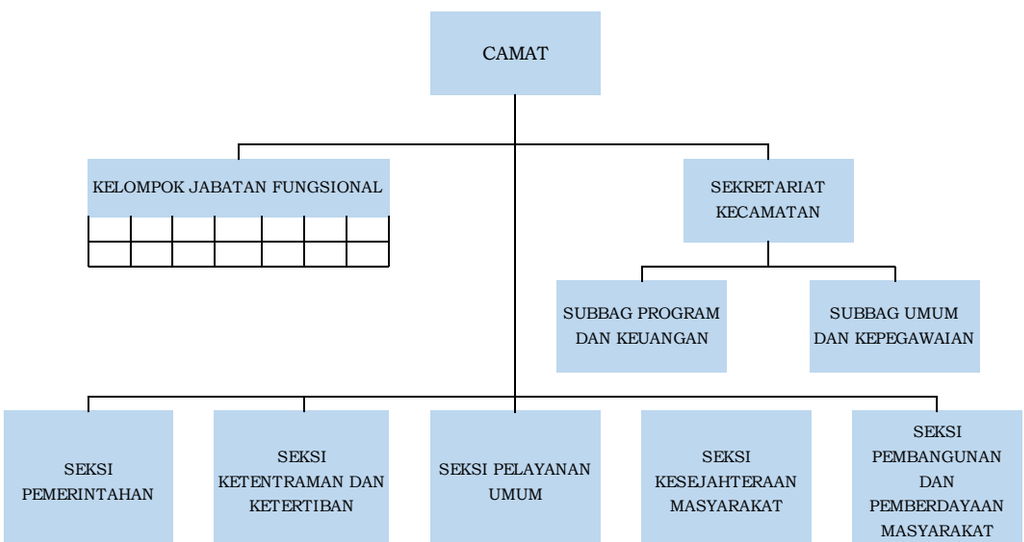

2.1.4 Uraian Tugas

Untuk melaksanakan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, yaitu Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

a. Camat

Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

(a) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
(b) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
(c) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
(d) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
(e) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
(f) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
(g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
(h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
(i) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan terdiri dari:

- Sekretariat;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Seksi Pelayanan Umum;
- Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas pada setiap Seksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

(a) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Kecamatan;
(b) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Kecamatan;
(c) pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
(d) pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup Kecamatan;
(e) pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pada masing-masing unit Kecamatan; dan
(f) pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris terdiri dari :

- Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

(a) pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
(b) pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program Kecamatan;
(c) pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan Kecamatan; dan
(d) evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja Kecamatan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

(a) penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
(b) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Kecamatan, penataan kearsipan

Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;

(c) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

(d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

(a) penyusunan rencana dan program Seksi Pemerintahan;

(b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;

(c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat; dan

(d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

(a) penyusunan rencana dan program Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
(b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
(c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
(d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

(a) penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
(b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
(c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pelayanan Umum;
(d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

h. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.bKepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

(a) penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
(b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
(c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat;
(d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

i. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

(a) penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

(b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
(c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
(d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah harus didukung oleh sumber daya yang dimilikinya yaitu sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana (aset/modal).

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya. Sampai saat ini Pegawai Kecamatan Bengkong berjumlah 67 orang, terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang Non PNS/Tenaga Kontrak.

Sumber daya aparatur Kecamatan Bengkong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
1	Sekretariat	2	2	0	6	2	2	0	14
2	Seksi Pemerintahan	0	0	0	1	1	0	0	2
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0	1	1	1	0	1	0	4
4	Seksi Pelayanan Umum	1	2	1	2	2	0	1	9
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	0	1	1	0	0	0	1	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	1	0	0	3	0	0	4
7	Kelurahan Bengkong Laut	1	1	0	3	1	2	0	8
8	Kelurahan Bengkong Indah	0	1	0	2	2	2	1	8
9	Kelurahan Sadai	0	2	1	2	1	1	1	8
10	Kelurahan Tanjung Buntung	0	2	0	0	2	1	2	7
	Total	**4**	**13**	**4**	**17**	**14**	**9**	**6**	**67**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2021).

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah pegawai Kecamatan Bengkong menurut kelompok umur di dominasi usia 36-40 tahun sebanyak 17 orang dan paling sedikit usia 20-25 tahun sebanyak 4 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Unit Wilayah	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	Non PNS	
1	Sekretariat	0	3	6	1	4	14
2	Seksi Pemerintahan	0	0	2	0	0	2
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0	0	2	0	2	4
4	Seksi Pelayanan Umum	0	0	3	0	6	9
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	0	0	2	0	1	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	3	0	1	4
7	Kelurahan Bengkong Laut	0	0	6	0	2	8
8	Kelurahan Bengkong Indah	0	0	7	0	1	8
9	Kelurahan Sadai	0	0	4	1	3	8
10	Kelurahan Tanjung Buntung	0	0	5	0	2	7
	Total	**0**	**3**	**40**	**2**	**22**	**67**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2021).

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa jumlah PNS Kecamatan Bengkong menurut golongan di dominasi golongan III sebanyak 40 orang dan paling sedikit golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	5	2	6	1	14
2	Seksi Pemerintahan	0	0	2	0	2
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2	0	2	0	4
4	Seksi Pelayanan Umum	5	0	4	0	9
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	2	0	1	0	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	1	2	1	4
7	Kelurahan Bengkong Laut	2	0	5	1	8
8	Kelurahan Bengkong Indah	2	1	5	0	8
9	Kelurahan Sadai	3	0	3	2	8
10	Kelurahan Tanjung Buntung	3	0	4	0	7
	Total	**24**	**4**	**34**	**5**	**67**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2021).

Dari tabel 2.3 diketahui bahwa jumlah pegawai Kecamatan Bengkong menurut tingkat pendidikan di dominasi S1 sebanyak 34 orang dan paling sedikit S2 sebanyak 5 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	0
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	26
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	0
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	18
6	Non PNS/ Tenaga Kontrak	22
	Total	**67**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2021).

2.2.2 Aset

Selain sumber daya aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bengkong harus didukung oleh sarana dan prasarana (aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bengkong Kota Batam didukung sarana dan prasarana sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar Aset/Modal Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7	bidang
2	Pompa	1	Unit
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	Unit
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13	Unit
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7	Unit
6	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	1	Unit
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	1	Unit
8	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	Unit
9	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	32	Unit
10	Alat Kantor Lainnya	14	Unit
11	Mebel	28	Unit
12	Alat Pembersih	3	Unit
13	Alat Pendingin	22	Unit
14	Alat Dapur	3	Set
15	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19	Unit
16	Meja Kerja Pejabat	52	Unit
17	Kursi Kerja Pejabat	34	Unit
18	Lemari dan Arsip Pejabat	17	Unit
19	Peralatan Studio Video dan Film	3	Unit
20	Alat Komunikasi Telephone	2	Unit
21	Personal Computer	43	Unit
22	Peralatan Personal Computer	35	Unit
23	Peralatan Jaringan	1	Unit
24	Bangunan Gedung Kantor	5	Unit
25	Bangunan Kesehatan	3	Unit
26	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Unit
27	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13	Unit
28	Bangunan Terbuka	1	Unit
29	Rumah Negara Golongan II	1	Unit
30	Pagar	2	Unit
31	Jalan Khusus	83	paket
32	Jalan Lainnya	12	paket
33	Bangunan Pelengkap Irigasi	10	paket
34	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	47	paket
35	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	8	paket
36	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1	Unit
37	Jaringan Air Minum Lainnya	1	Unit

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Camat Bengkong (November 2021).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bengkong berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bengkong dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

T-C.23

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam			100%	40%	40%	45%	50%	55%	40%	40%	45%	50%	55%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan			297 RT, 62 RW, 5 LPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pengangkutan sampah			80%	-	65%	70%	75%	80%	-	65%	70%	75%	80%	-	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat			9%	-	6%	7%	8%	9%	-	6%	7%	8%	9%	-	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.6 terlihat bahwa indikator (1) “Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (2) “Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (3) “Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (4) “Persentase pengangkutan sampah”, realisasi capaian tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; dan indikator (5) “Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat, realisasi capaian tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bengkong berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bengkong dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021 telah tercapai.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Bengkong Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

T-C.24

Uraian *)		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NON URUSAN																		
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.549.959.001,00	1.672.787.360,00	1.923.705.464,00	1.425.342.064,00	1.399.798.600,00	1.481.423.311,00	1.459.144.293,00	1.160.847.826,00	1.368.138.872,00	1.296.158.571,00	96%	87%	60%	96%	93%	1.594.318.497,80	1.353.142.574,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.031.960.000,00	792.000.000,00	871.200.000,00	134.332.400,00	33.690.000,00	1.023.936.400,00	342.894.500,00	42.175.000,00	129.939.400,00	33.690.000,00	99%	43%	5%	97%	100%	572.636.480,00	314.527.060,00
LINGKUNGAN HIDUP																		
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	2.783.893.212,00	3.062.282.533,20	2.323.175.972,00	2.485.722.600,00	-	2.281.524.231,00	2.398.701.964,00	2.306.872.230,00	2.412.947.422,00	0%	82%	78%	99%	97%	2.131.014.863,44	1.880.009.169,40
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
1	Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	2.761.580.000,00	2.553.212.000,00	2.808.533.200,00	2.756.409.000,00	2.474.330.000,00	2.753.868.250,00	2.443.227.000,00	2.542.820.000,00	2.715.349.000,00	2.445.180.000,00	100%	96%	91%	99%	99%	2.670.812.840,00	2.580.088.850,00
2	Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan	-	4.000.000.000,00	4.400.000.000,00	5.304.673.000,00	1.464.000.000,00	-	3.464.668.000,00	3.088.909.500,00	5.256.971.000,00	1.426.822.000,00	0%	87%	70%	99%	97%	3.033.734.600,00	2.647.474.100,00
Total		5.343.499.001,00	11.801.892.572,00	13.065.721.197,20	11.943.932.436,00	7.857.541.200,00	5.259.227.961,00	9.991.458.024,00	9.233.454.290,00	11.777.270.502,00	7.614.797.993,00	98%	85%	71%	99%	97%	12.766.408.373,46	10.033.680.707,50

Realisasi anggaran Kecamatan Bengkong selama periode anggaran Tahun 2016-2020, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Bengkong pada tabel 2.7 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 96%, 87%, 96%, dan 93%. Sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 60%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, tahun 2016, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 99%, 97%, dan 100%. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 43% dan 5%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, tahun 2017, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 82%, 99%, dan 97%. Sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 78%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
4. Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 100%, 96%, 91%, 99%, dan 99%.
5. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan, tahun 2017, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 87%, 99%, dan 97%. Sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan

anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 70%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Sejak tahun 2013, Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah kecamatan yang dilaksankan di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyrakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Ruang lingkup penyelenggaraan PATEN di kecamatan meliputi pelayanan bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015.

Meskipun sudah berjalan selama ± 3 (tiga) tahun, penyelenggaraan PATEN masih jauh dari sempurna. Masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap kualitas

pelayanan PATEN, baik itu sarana prasarana, sumber daya aparatur, maupun waktu penyelesaian layanan.

Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, pada misi kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan ef isien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyaraka, maka penerapan *e-government* sudah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. *E-government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Penerapan *e-government* di kecamatan tentu berimplikasi ke pelayanan PATEN, dan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan karena akan lebih mempermudah masyarakat atau pemangku kepentingan lain baik itu prosedur pelayanan, waktu, dan biaya. Dengan penerapan *e-government*, maka penguasaan teknologi informasi oleh aparatur kecamatan merupakan suatu keharusan.

Selain PATEN, penerapan *e-government* juga dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan yaitu e-musrenbang, dimana usulan-usulan pembangunan dari masyarakat dimasukkan ke dalam aplikasi berbasis internet. E-musrenbang diharapkan dapat menyajikan data yang lebih akurat dan lebih efektif menyaring usulan masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui usulan kegiatan di wilayahnya dapat dengan mudah mengakses informasi melalui situs resmi Pemerintah Kota Batam.

Pelimpahan wewenang kepada kecamatan tidak hanya di bidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan melalui PATEN. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam, Kecamatan diserahkan tugas melaksanakan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau *bin container*, yang akan dimulai pada tahun 2017.

Dibidang infrastruktur permukiman, berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 180 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan (Delegasi) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman di Wilayah Kelurahan, kecamatan juga diserahi tugas sebagian kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan.

2.4.2 Peluang

Dengan adanya pelimpahan kewenangan bidang perizinan dan non perizinan, penanganan persampahan/kebersihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan, memberikan peluang bagi kecamatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dimasa yang akan datang. Jarak yang dekat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus KTP Elektronik dan dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Peluang dari segi koordinasi dan pengawasan persampahan juga lebih gampang sehingga ketika terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bengkong baik permasalahan internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

2) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi;

3) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di kecamatan maupun kelurahan seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan;

4) Dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Permasalahan Eksternal

1) Beberapa kelengkapan pelayanan masih bergantung ketersediaan dari pemerintah pusat, seperti blanko KTP elektronik, dimana pengadaan dan distribusinya oleh Kementerian Dalam Negeri;
2) Masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain;
3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah;
4) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih harus ditingkatkan.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya jumlah aparatur yang memadai	Terbatasnya sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas	Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki
			Terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi
			Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
2	Kurangnya dukungan anggaran	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
		Dukungan anggaran belum mencukupi	Dukungan anggaran belum mencukupi untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021 – 2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021 –2026.

Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu "Bandar Dunia", "Madani", "Modern" dan "Sejahtera". Pokok visi "Bandar Dunia", "Madani", dan "Sejahtera" menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi "Modern" menunjukkan penekanan cara atau 'bagaimana' untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

a. "Bandar Dunia" mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".

b. "Madani" bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang

berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.

c. "Sejahtera" mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada.

d. "Modern" mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi "modern" menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku "modern" untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera", beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai

potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagi tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "center of excellence" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

   Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial

terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" sekaligus "Bandar Dunia". Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang "sejahtera" akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Madani", yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya

tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang tetap mengedepankan sikap *religius*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Kecamatan Bengkong Kota Batam berada dalam misi kelima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan secara tidak langsung juga mendukung misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Renstra Pemerintah Kota Batam menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bengkong dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian/Lembaga dan Provinsi serta Pemerintah Kota Batam yang menjadi acuan Kecamatan Bengkong dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua

sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Bengkong.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS menjadi pondasi dasar dalam upaya penjaminan lingkungan hidup masa depan sehingga pembangunan akan berkelanjutan.

KLHS Kota Batam telah disusun pada tahun 2015. Berdasarkan KLHS terdapat empat isu pokok yang sangat strategis di Kota Batam, salah satunya adalah isu penggunaan ruang yang terus mengalami perubahan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan demografi. Berdasarkan hasil KLHS yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dirumuskan, salah satunya rekomendasi tata ruang:

1. Perlunya revisi RTRW Kota Batam dengan ketentuan zonasi lebih ketat;
2. Perlunya program atau kebijakan mengenai status quo Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru;
3. Perlunya media koordinasi rutin untuk mengatasi kesulitan investor dalam mendapatkan lahan atau PL;
4. Perlunya menyusun roadmap peningkatan jaringan sarana – prasarana berstandar internasional;
5. Perlunya kebijakan tegas untuk mempertahankan kawasan lindung dan meningkatkan kualitasnya; dan
6. Perlunya memperkuat institusi pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang relevan dan penting bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong, yaitu:

1. Reformasi birokrasi.

   Reformasi birokrasi ditujukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik. Melalui reformasi birokrasi kedepannya jika dilaksanakan dengan baik diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat Kota Batam terhadap pelayanan yang diberikan.

2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

   Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Bengkong harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan *(stakeholders)* terhadap kinerja *(performance)* dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompentensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam, maka Kecamatan Bengkong menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk lima (5) tahun ke depan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Bengkong adalah:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bengkong yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bengkong adalah:

a. Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah pada tingkat kecamatan; dan
b. Optimalnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

T-C.25

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bengkong yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah pada tingkat kecamatan	Persentase pengelolaan sampah	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%
		Optimalnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	88,31	89	90	91	92

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan identifikasi permaalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bengkong, maka dilakukan analisa SWOT *(strength. weakness, opportunities, dan threat)* untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat tercapai.

a. Analisa Kekuatan *(strength)*
   1) Potensi sumber daya aparatur untuk maju dan berkembang;
   2) Sarana prasarana aparatur yang tersedia
   3) Struktur organisasi yang mendukung untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelimpahan sebagian wewenang Walikota Batam.

b. Analisa Kelemahan *(weakness)*
   1) Kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik oleh aparatur;
   2) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
   3) Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi.

c. Analisa Peluang *(opportunities)*
   1) Paradigma baru Walikota terpilih untuk untuk melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan;
   2) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada kecamatan memberikan kecamatan wewenang lebih besar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan;
   3) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin mempemudah pelayanan kepada masyarakat;
   4) Peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi.

d. Analisa Ancaman *(threat)*
   1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas yang terutama tenaga IT;
   2) Keterbatasan anggaran;
   3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah;
   4) Tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja semakin tinggi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Bengkong tahun 2021-2026 sesuai dengan visi dan misi Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

T-C.26

VISI	:	Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera
MISI 5	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bengkong yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah pada tingkat kecamatan	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dalam pengangkutan sampah rumah tangga	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup
	Optimalnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu alau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yangmenggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kelompok sasaran pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Kecamatan Bengkong.

Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kota Batam

T-C.27

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Pogram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	16	13	16	13	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bengkong yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah pada tingkat kecamatan	Persentase pengelolaan sampah	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas**	**20%**	**20%**	**2.564.117.200**	**18%**	**3.333.697.380**	**13%**	**3.338.455.570**	**10%**	**3.457.304.588**	**8%**	**3.584.879.127**	**5%**	**3.722.179.998**	**5%**	**20.000.633.864**	**Kecamatan Bengkong**	**Kota Batam**
			2.11.11.2.01	***Pengelolaan Sampah***	***Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas***	**20%**	**20%**	***2.564.117.200***	**18%**	***3.333.697.380***	**13%**	***3.338.455.570***	**10%**	***3.457.304.588***	**8%**	***3.584.879.127***	**5%**	***3.722.179.998***	**5%**	***20.000.633.864***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
			2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah RT se Kecamatan yang dilayani penanganan (pengangkutan) sampahnya	297 RT	297 RT	2.564.117.200	300 RT	2.635.207.380	300 RT	2.665.987.514	300 RT	2.760.896.669	300 RT	2.862.773.756	300 RT	2.972.417.991	300 RT	16.461.400.511	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Armada pengangkutan sampah yang terpelihara	0	0	0,00	7 Unit	698.490.000	7 Unit	672.468.056	7 Unit	696.407.919	7 Unit	722.105.371	7 Unit	749.762.007	7 Unit	3.539.233.352	Kecamatan Bengkong	Kota Batam

Optimalnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**9.948.587.203**	**100%**	**12.533.593.786**	**100%**	**13.074.670.412**	**100%**	**13.540.128.679**	**100%**	**14.039.759.427**	**100%**	**14.577.482.213**	**100%**	**77.714.221.721**	**Kecamatan Bengkong**	**Kota Batam**
		7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi***	***100%***	***100%***	***7.963.183.864***	***100%***	***9.780.346.661***	***100%***	***10.116.790.586***	***100%***	***10.476.948.331***	***100%***	***10.863.547.724***	***100%***	***11.279.621.602***	***100%***	***60.480.438.769***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang	7.863.543.864	47 Orang	9.709.536.661	47 Orang	10.043.544.722	47 Orang	10.401.094.914	47 Orang	10.784.895.317	47 Orang	11.197.956.807	47 Orang	60.000.572.285	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	99.640.000	5 Kegiatan	70.810.000	5 Kegiatan	73.245.864	5 Kegiatan	75.853.417	5 Kegiatan	78.652.408	5 Kegiatan	81.664.795	5 Kegiatan	479.866.484	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***	***100%***	***100%***	***0,00***	***100%***	***-***	***100%***	***50.050.000***	***100%***	***51.831.780***	***100%***	***53.744.373***	***100%***	***55.802.782***	***100%***	***211.428.935***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00	0%	-	70 Stell	50.050.000	70 Stell	51.831.780	70 Stell	53.744.373	70 Stell	55.802.782	280 Stell	211.428.935	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***	***277.053.800***	***100%***	***345.665.445***	***100%***	***416.692.336***	***100%***	***431.526.583***	***100%***	***447.449.914***	***100%***	***464.587.246***	***100%***	***2.382.975.325***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	3.375.000	4 Jenis	4.702.500	4 Jenis	4.864.266	4 Jenis	5.037.434	4 Jenis	5.223.315	4 Jenis	5.423.368	4 Jenis	28.625.883	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	768.000	1 Jenis	858.600	1 Jenis	888.136	1 Jenis	919.753	1 Jenis	953.692	1 Jenis	990.219	1 Jenis	5.378.400	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	726.000	1 Jenis	1.144.000	1 Jenis	1.183.354	1 Jenis	1.225.481	1 Jenis	1.270.701	1 Jenis	1.319.369	1 Jenis	6.868.905	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam

			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	1.258.000	4 Jenis	1.144.000	4 Jenis	1.183.354	4 Jenis	1.225.481	4 Jenis	1.270.701	4 Jenis	1.319.369	4 Jenis	7.400.905	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	807.000	3 Jenis	2.946.700	3 Jenis	3.048.066	3 Jenis	3.156.578	3 Jenis	3.273.055	3 Jenis	3.398.413	3 Jenis	16.629.813	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	40 Jenis	40 Jenis	43.459.000	50 Jenis	57.067.305	50 Jenis	59.030.420	50 Jenis	61.131.903	50 Jenis	63.387.670	50 Jenis	65.815.418	50 Jenis	349.891.717	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	18 Jenis	18 Jenis	7.680.000	30 Jenis	11.159.775	30 Jenis	11.543.671	30 Jenis	11.954.626	30 Jenis	12.395.752	30 Jenis	12.870.509	30 Jenis	67.604.333	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	26 Jenis	26 Jenis	7.845.500	45 Jenis	14.026.770	45 Jenis	14.509.291	45 Jenis	15.025.822	45 Jenis	15.580.274	45 Jenis	16.176.999	45 Jenis	83.164.656	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	21 Jenis	21 Jenis	10.408.500	48 Jenis	15.227.720	48 Jenis	15.751.554	48 Jenis	16.312.309	48 Jenis	16.914.233	48 Jenis	17.562.048	48 Jenis	92.176.364	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	29 Jenis	29 Jenis	10.249.000	49 Jenis	16.377.725	49 Jenis	16.941.119	49 Jenis	17.544.223	49 Jenis	18.191.604	49 Jenis	18.888.343	49 Jenis	98.192.014	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	18.972.000	0	-	2 Jenis	59.136.000	2 Jenis	61.241.242	2 Jenis	63.501.043	2 Jenis	65.933.133	2 Jenis	268.783.418	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	16.250.000	3 Jenis	16.246.000	3 Jenis	16.804.862	3 Jenis	17.403.116	3 Jenis	18.045.290	3 Jenis	18.736.425	3 Jenis	103.485.693	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	16.250.000	3 Jenis	14.746.000	3 Jenis	15.253.262	3 Jenis	15.796.279	3 Jenis	16.379.161	3 Jenis	17.006.483	3 Jenis	95.431.185	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	16.250.000	3 Jenis	16.246.000	3 Jenis	16.804.862	3 Jenis	17.403.116	3 Jenis	18.045.290	3 Jenis	18.736.425	3 Jenis	103.485.693	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	16.250.000	3 Jenis	16.246.000	3 Jenis	16.804.862	3 Jenis	17.403.116	3 Jenis	18.045.290	3 Jenis	18.736.425	3 Jenis	103.485.693	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam

			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	40.205.300	6 Jenis	43.315.000	6 Jenis	44.805.036	6 Jenis	46.400.095	6 Jenis	48.112.259	6 Jenis	49.954.958	6 Jenis	272.792.648	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	8.983.500	10 Jenis	9.916.500	10 Jenis	10.257.628	10 Jenis	10.622.799	10 Jenis	11.014.780	10 Jenis	11.436.647	10 Jenis	62.231.854	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	9.170.000	15 Jenis	11.905.100	15 Jenis	12.314.635	15 Jenis	12.753.036	15 Jenis	13.223.624	15 Jenis	13.730.088	15 Jenis	73.096.484	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	12.430.000	15 Jenis	17.530.750	15 Jenis	18.133.808	15 Jenis	18.779.371	15 Jenis	19.472.330	15 Jenis	20.218.120	15 Jenis	106.564.380	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	11.245.000	11 Jenis	16.915.000	11 Jenis	17.496.876	11 Jenis	18.119.765	11 Jenis	18.788.384	11 Jenis	19.507.979	11 Jenis	102.073.004	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	24.472.000	8 Kali	57.944.000	8 Kali	59.937.274	8 Kali	62.071.041	8 Kali	64.361.462	8 Kali	66.826.506	48 Kali	335.612.282	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***	***100%***	***100%***	***164.220.000***	***100%***	***630.747.000***	***100%***	***652.444.697***	***100%***	***675.671.728***	***100%***	***700.604.015***	***100%***	***727.437.149***	***100%***	***3.551.124.588***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	-	-	-	7 Jenis	189.635.000	7 Jenis	196.158.444	7 Jenis	203.141.685	7 Jenis	210.637.613	7 Jenis	218.705.033	7 Jenis	1.018.277.775	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis	5 Jenis	164.220.000	9 Jenis	295.712.000	9 Jenis	305.884.493	9 Jenis	316.773.981	9 Jenis	328.462.941	9 Jenis	341.043.071	9 Jenis	1.752.096.485	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	-	1 Jenis	145.400.000	1 Jenis	150.401.760	1 Jenis	155.756.063	1 Jenis	161.503.461	1 Jenis	167.689.044	1 Jenis	780.750.328	Kecamatan Bengkong	Kota Batam

		7.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***100%***	***1.208.064.320***	***100%***	***1.336.335.680***	***100%***	***1.382.305.627***	***100%***	***1.431.515.708***	***100%***	***1.484.338.637***	***100%***	***1.541.188.807***	***100%***	***8.383.748.780***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	180.486.000	4 Jenis	180.486.000	4 Jenis	186.694.718	4 Jenis	193.341.050	4 Jenis	200.475.335	4 Jenis	208.153.540	4 Jenis	1.149.636.644	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	33.000.000	3 Jenis	33.000.000	3 Jenis	34.135.200	3 Jenis	35.350.413	3 Jenis	36.654.843	3 Jenis	38.058.724	3 Jenis	210.199.180	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	30.500.000	3 Jenis	30.500.000	3 Jenis	31.549.200	3 Jenis	32.672.352	3 Jenis	33.877.961	3 Jenis	35.175.487	3 Jenis	194.275.000	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	31.000.000	3 Jenis	31.000.000	3 Jenis	32.066.400	3 Jenis	33.207.964	3 Jenis	34.433.338	3 Jenis	35.752.135	3 Jenis	197.459.836	Kelurahan Sadai	Kota Batam
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	29.800.000	3 Jenis	29.800.000	3 Jenis	30.825.120	3 Jenis	31.922.494	3 Jenis	33.100.434	3 Jenis	34.368.181	3 Jenis	189.816.230	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	14 Orang	14 Orang	576.959.600	17 Orang	705.230.960	17 Orang	729.490.905	17 Orang	755.460.781	17 Orang	783.337.284	17 Orang	813.339.102	17 Orang	4.363.818.632	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	2 Orang	2 Orang	81.579.680	2 Orang	81.579.680	2 Orang	84.386.021	2 Orang	87.390.163	2 Orang	90.614.860	2 Orang	94.085.410	2 Orang	519.635.814	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	2 Orang	2 Orang	81.579.680	2 Orang	81.579.680	2 Orang	84.386.021	2 Orang	87.390.163	2 Orang	90.614.860	2 Orang	94.085.410	2 Orang	519.635.814	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam

			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	2 Orang	2 Orang	81.579.680	2 Orang	81.579.680	2 Orang	84.386.021	2 Orang	87.390.163	2 Orang	90.614.860	2 Orang	94.085.410	2 Orang	519.635.814	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	2 Orang	2 Orang	81.579.680	2 Orang	81.579.680	2 Orang	84.386.021	2 Orang	87.390.163	2 Orang	90.614.860	2 Orang	94.085.410	2 Orang	519.635.814	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
			7.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***	***100%***	***100%***	***336.065.219***	***100%***	***440.499.000***	***100%***	***456.387.166***	***100%***	***472.634.549***	***100%***	***490.074.764***	***100%***	***508.844.627***	***100%***	***2.704.505.324***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	17 Unit	17 Unit	90.040.000	17 Unit	134.140.000	17 Unit	138.754.416	17 Unit	143.694.073	17 Unit	148.996.385	17 Unit	154.702.946	17 Unit	810.327.820	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	2 Unit	2 Unit	600.000	2 Unit	600.000	2 Unit	620.640	2 Unit	642.735	2 Unit	666.452	2 Unit	691.977	2 Unit	3.821.803	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	1 Unit	1 Unit	300.000	1 Unit	300.000	1 Unit	310.320	1 Unit	321.367	1 Unit	333.226	1 Unit	345.988	1 Unit	1.910.902	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam

			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	-	-	0,00	-	-	2 Unit	735.000	2 Unit	761.166	2 Unit	789.253	2 Unit	819.481	2 Unit	3.104.900	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	2 Unit	2 Unit	600.000	2 Unit	600.000	2 Unit	620.640	2 Unit	642.735	2 Unit	666.452	2 Unit	691.977	2 Unit	3.821.803	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	203.275.219	6 Unit	266.059.000	6 Unit	275.211.430	6 Unit	285.008.956	6 Unit	295.525.787	6 Unit	306.844.425	6 Unit	1.631.924.817	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000	1 Unit	600.000	1 Unit	620.640	1 Unit	642.735	1 Unit	666.452	1 Unit	691.977	1 Unit	3.821.803	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000	1 Unit	600.000	1 Unit	620.640	1 Unit	642.735	1 Unit	666.452	1 Unit	691.977	1 Unit	3.821.803	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000	1 Unit	600.000	1 Unit	620.640	1 Unit	642.735	1 Unit	666.452	1 Unit	691.977	1 Unit	3.821.803	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000	1 Unit	600.000	1 Unit	620.640	1 Unit	642.735	1 Unit	666.452	1 Unit	691.977	1 Unit	3.821.803	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	38.850.000	59 Unit	36.400.000	59 Unit	37.652.160	59 Unit	38.992.577	59 Unit	40.431.403	59 Unit	41.979.926	59 Unit	234.306.066	Kecamatan Bengkong	Kota Batam

		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD**	**1. 100% 2. 100%**	**1. 100% 2. 100%**	**2.282.700.000**	**1. 100% 2. 100%**	**2.302.992.500**	**1. 100% 2. 100%**	**2.382.215.442**	**1. 100% 2. 100%**	**2.467.022.312**	**1. 100% 2. 100%**	**2.558.055.435**	**1. 100% 2. 100%**	**2.656.028.958**	**1. 100% 2. 100%**	**14.649.014.647**	***Kecamatan Bengkong***	**Kota Batam**
		7.01.02.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	**100%**	**100%**	***2.282.700.000***	**100%**	***2.302.992.500***	**100%**	***2.382.215.442***	**100%**	***2.467.022.312***	**100%**	***2.558.055.435***	**100%**	***2.656.028.958***	**100%**	***14.649.014.647***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan yang direkomendasikan ke forum OPD	93 Usulan	93 Usulan	98.700.000	100 Usulan	100.992.500	100 Usulan	104.466.642	100 Usulan	108.185.654	100 Usulan	112.177.705	100 Usulan	116.474.111	593 Usulan	640.996.613	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT/RW/LPM yang difasilitasi peningkatan efektifitas kegiatannya	RT 297, RW 62, LPM 4	RT 297, RW 62, LPM 4	2.184.000.000	RT 300, RW 63, LPM 4	2.202.000.000	RT 300, RW 63, LPM 4	2.277.748.800	RT 300, RW 63, LPM 4	2.358.836.657	RT 300, RW 63, LPM 4	2.445.877.730	RT 300, RW 63, LPM 4	2.539.554.847	RT 300, RW 63, LPM 4	14.008.018.034	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya**	**1. 40% 2. 100%**	**1. 10% 2. 100%**	**11.679.527.800**	**1. 10% 2. 100%**	**12.337.846.950**	**1. 10% 2. 100%**	**12.762.268.885**	**1. 10% 2. 100%**	**13.216.605.657**	**1. 10% 2. 100%**	**13.704.298.406**	**1. 10% 2. 100%**	**14.229.173.035**	**1. 100% 2. 100%**	**77.929.720.734**	**Kecamatan Bengkong**	**Kota Batam**
		7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun***	***10%***	***10%***	***11.679.527.800***	***10%***	***12.337.846.950***	***10%***	***12.762.268.885***	***10%***	***13.216.605.657***	***10%***	***13.704.298.406***	***10%***	***14.229.173.035***	***10%***	***77.929.720.734***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***

			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	100%	5.250.000	100%	5.248.000	100%	5.428.531	100%	5.621.787	100%	5.829.231	100%	6.052.490	100%	33.430.039	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	100%	5.250.000	100%	5.248.000	100%	5.428.531	100%	5.621.787	100%	5.829.231	100%	6.052.490	100%	33.430.039	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	100%	5.250.000	100%	5.248.000	100%	5.428.531	100%	5.621.787	100%	5.829.231	100%	6.052.490	100%	33.430.039	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	100%	5.250.000	100%	5.248.000	100%	5.428.531	100%	5.621.787	100%	5.829.231	100%	6.052.490	100%	33.430.039	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dibangun di kelurahan	10 usulan	10 usulan	1.076.127.000	16 usulan	1.834.851.400	16 usulan	1.897.970.288	16 usulan	1.965.538.030	16 usulan	2.038.066.384	16 usulan	2.116.124.326	90 Usulan	10.928.677.429	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dibangun di kelurahan	11 usulan	11 usulan	1.039.277.000	18 usulan	1.200.788.000	18 usulan	1.242.095.107	18 usulan	1.286.313.693	18 usulan	1.333.778.668	18 usulan	1.384.862.391	101 Usulan	7.487.114.860	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dibangun di kelurahan	9 usulan	9 usulan	1.662.213.500	28 usulan	3.731.771.500	28 usulan	3.860.144.440	28 usulan	3.997.565.582	28 usulan	4.145.075.752	28 usulan	4.303.832.153	149 Usulan	21.700.602.926	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dibangun di kelurahan	8 usulan	8 usulan	1.417.734.500	19 usulan	2.170.551.250	19 usulan	2.245.218.213	19 usulan	2.325.147.981	19 usulan	2.410.945.942	19 usulan	2.503.285.171	103 Usulan	13.072.883.058	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam

			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	50 Orang	50 Orang	21.581.900	100 Orang	37.287.400	100 Orang	38.570.087	100 Orang	39.943.182	100 Orang	41.417.085	100 Orang	43.003.359	550 Orang	221.803.013	Kelurahan Bengkong Laut	Kota Batam
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	50 Orang	50 Orang	21.581.900	60 Orang	46.987.000	60 Orang	48.603.353	60 Orang	50.333.632	60 Orang	52.190.943	60 Orang	54.189.856	350 Orang	273.886.684	Kelurahan Bengkong Indah	Kota Batam
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	100 Orang	100 Orang	*29.926.500*	128 Orang	42.967.100	128 Orang	44.445.168	128 Orang	46.027.416	128 Orang	47.725.828	128 Orang	49.553.727	740 Orang	260.645.739	Kelurahan Sadai	Kota Batam
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	100 Orang	100 Orang	36.055.500	100 Orang	69.512.300	100 Orang	71.903.523	100 Orang	74.463.289	100 Orang	77.210.984	100 Orang	80.168.165	600 Orang	409.313.760	Kelurahan Tanjung buntung	Kota Batam
			7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**1.227.560.000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**1.227.560.000**	**Kecamatan Bengkong**	**Kota Batam**
			7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan***	**100%**	**100%**	***1.227.560.000***		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**100%**	***1.227.560.000***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik		5 Posko	1.227.560.000		-		0		0		0		0	5 Posko	1.227.560.000	Kecamatan Bengkong	Kota Batam

					Indonesia yang difasilitasi																	
			7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan***	**100%**	**100%**	**890.450.000**	**100%**	**1.060.713.000**	**100%**	**1.097.201.527**	**100%**	**1.136.261.902**	**100%**	**1.178.189.966**	**100%**	**1.223.314.641**	**100%**	**6.586.131.036**	**Kecamatan Bengkong**	**Kota Batam**
			7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan***	**100%**	**100%**	***890.450.000***	**100%**	***1.060.713.000***	**100%**	***1.097.201.527***	**100%**	***1.136.261.902***	**100%**	***1.178.189.966***	**100%**	***1.223.314.641***	**100%**	***6.586.131.036***	***Kecamatan Bengkong***	***Kota Batam***
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang difasilitasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	225.785.000	3 Kegiatan	217.722.000	3 Kegiatan	225.211.637	3 Kegiatan	233.229.171	3 Kegiatan	241.835.327	3 Kegiatan	251.097.621	3 Kegiatan	1.394.880.756	Kecamatan Bengkong	Kota Batam

			7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional yang difasilitasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	619.190.000	5 Kegiatan	797.288.000	5 Kegiatan	824.714.707	5 Kegiatan	854.074.551	5 Kegiatan	885.589.902	5 Kegiatan	919.507.995	5 Kegiatan	4.900.365.155	Kecamatan Bengkong	Kota Batam
			7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.475.000	1 Kegiatan	45.703.000	1 Kegiatan	47.275.183	1 Kegiatan	48.958.180	1 Kegiatan	50.764.737	1 Kegiatan	52.709.026	1 Kegiatan	290.885.125	Kecamatan Bengkong	Kota Batam

Dari tabel 6.1 tersebut dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Kecamatan Bengkong Kota Batam yang akan dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bengkong selama tahun 2021-2026, selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sumber dana untuk melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Strategi Kecamatan Bengkong (Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong) Kota Batam tahun 2021 – 2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bengkong yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bengkong dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Bengkong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pengelolaan sampah	82,36%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,36%	82%	88,31%	89%	90%	91%	92%	92%

Dari tabel 7.1 didapat beberapa indikator kinerja Kecamatan Bengkong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu:

1. Persentase pengelolaan sampah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat;

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong Kota Batam pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Kecamatan Bengkong Kota Batam menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan ranhir renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu: “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Kota Batam dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BENGKONG
Jl. Raya Sadai No. 1 Bengkong, Kota Batam 29432
Telp.(0778) 4100146, email : kecamatanbengkong@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BENGKONG
Nomor : KPTS. 15 /CB/I/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN ANGGARAN 2021-2026
KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

CAMAT BENGKONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2021-2026, perlu ditetapkan Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bengkong tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2021-2026, Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2021-2026 Kecamatan Bengkong Kota Batam, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2021-2026 Kecamatan Bengkong Kota Batam, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Renstra Tahun 2021-2026.
b. Menyusun dokumen Renstra tahun 2021-2026, sesuai tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkong
Pada tanggal : Januari 2021

CAMAT BENGKONG

M.FAIRUS R. BATUBARA, S.STP, M.Si
Pembina / NIP. 19820620 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Bengkong
Nomor: Kpts. 15 /CB/I/2021
Tanggal: Januari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BENGKONG
TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	CAMAT BENGKONG	KETUA TIM
2	SEKRETARIS KECAMATAN BENGKONG	SEKRETARIS TIM
3	KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN BENGKONG	ANGGOTA
4	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN BENGKONG	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN BENGKONG	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN BENGKONG	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN BENGKONG	ANGGOTA
8	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN BENGKONG	ANGGOTA
9	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN BENGKONG	ANGGOTA
10	LURAH BENGKONG LAUT	ANGGOTA
11	LURAH BENGKONG INDAH	ANGGOTA
12	LURAH SADAI	ANGGOTA
13	LURAH TANJUNG BUNTUNG	ANGGOTA

CAMAT BENGKONG

M.FAIRUS R. BATUBARA, S.STP, M.Si
Pembina / NIP. 19820620 200112 1 001